

**KARAKTERISTIK INSUBORDINASI DAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

SKRIPSI



OLEH:

CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA

NPM : 23300121

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK INSUBORDINASI DAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

SKRIPSI



OLEH:

CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA

NPM : 23300121

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK INSUBORDINASI DAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH;

CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA

NPM : 23300121

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

KARAKTERISTIK INSUBORDINASI DAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH;
CHRISTIAN ENDITA UDAYANA
NPM : 23300121

SURABAYA, 10 JULI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

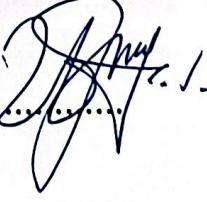
KARAKTERISTIK INSUBORDINASI DAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH;
CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA
NPM : 23300121

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 16 JULI 2024
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI SYARAT

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H. (Ketua) 1. 
2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H. (Anggota) 2. 
3. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. (Anggota) 3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Karakteristik Insubordinasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anggota Militer” sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta Bpk Ignatius Mudjiyono dan Ibu Veronica Sitiriyah serta Bapak ibu mertua terkasih Bpk. Sunoto beserta Ibu Eni Indriastuti yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dorongan semangat serta motifasi kepada penulis dalam berbagai hal baik terutama dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Peran serta istri tercinta Maharani Putri Adhinata AMd. Keb dan ananda Graceia Lovely Christian Putri, serta keluarga besar PT. BADRA MAJU BERSAMA yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan terima kasih atas segala dorongan, bantuan, semangat dan inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. SP.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat sabar membimbing, menuntun, dan memberikan banyak arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi berkal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas bantuannya dan pelayanannya selama mengikuti perkuliahan.
6. Yang terhormat Kaotmilti III Surabaya Laksamana Pertama Dr. Ali Ridlo S.H., M.M., juga Kaotmil III-11 Surabaya Kolonel Laut (H) Sunariyadi S.H serta Kabidtut Orjen Mabes TNI Kolonel Laut (H) Ediyanto Kesumo S.H., M.H., serta seluruh atasan, senior rekan-rekan sejawat di Oditurat Militer III Surabaya yang telah memberikan petunjuk serta arahan juga ijin belajar bagi penulis.
7. Teman – teman se angkatan yang saling support satu sama yang lain, saling memotivasi dan telah bersama-sama dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Serta terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas dukungan doa dan semangat yang sangat berarti bagi saya
Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, Juli 2024

Yang Menyatakan,

CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA

NPM : 23300121

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA
NPM : 23300121
Alamat : Jade Garden Blok D-8 Pekarungan Sukodono Sidoarjo.
No. Telp. (HP) : 082141738346.

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “**KARAKTERISTIK INSUBORDINASI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, Juli 2024

Yang Menyatakan,

CHRISTIAN ENDRITA UDAYANA

NPM : 23300121

ABSTRAK

Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki sikap yang konsisten dalam menegakkan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum. Selain terikat oleh hukum umum, mereka juga tunduk pada seperangkat peraturan khusus yang dikenal sebagai hukum militer. Perilaku semua personel TNI diatur oleh hukum militer, yang mencakup perilaku mereka terhadap atasan mereka. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam hukum militer secara khusus membahas masalah pertanggungjawaban bawahan kepada atasan ketika perilaku mereka menyimpang dari pedoman yang ditentukan yang dikenal sebagai santi aji, yang wajib dipatuhi oleh semua prajurit TNI. Pengaturan ini diuraikan dalam bab IV buku kedua tentang kejahatan, yang berfokus pada pelanggaran yang terkait dengan tugas dinas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan insubordinasi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menilai tanggung jawab hukum anggota TNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Analisis akan didasarkan pada Pasal 97 sampai dengan 109 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Selain itu, penelitian ini akan mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Polisi Militer, khususnya sebagai penyidik militer, dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana insubordinasi di lingkungan militer.

Penelitian ini mengkaji atribut-atribut tindakan kriminal insubordinasi yang dilakukan oleh anggota militer. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan variabel-variabel yang mempengaruhi kejadian insubordinasi dan tanggung jawab hukum dari mereka yang bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan teknik hukum normatif, menggunakan pendekatan legislatif dan studi kasus untuk menjelaskan penerapan penegakan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa insubordinasi sering kali muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perintah atasan, pemahaman tanggung jawab yang tidak memadai, dan pengaruh psikologis. Tanggung jawab hukum mencakup aspek prosedural sistem peradilan militer dan penerapan hukuman sesuai dengan aturan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan terkait tentang peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus insubordinasi yang dilakukan oleh personel Militer.

Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia, Militer, Insubordinasi

ABSTRACT

The Indonesian National Army (TNI) has a consistent posture in maintaining the law, as mandated by the legal framework. Furthermore, apart from being bound by common law, they are also subject to a distinct set of regulations known as military law. The conduct of all TNI personnel is governed by military law, which includes their conduct towards their superiors. The Military Criminal Code (KUHPM) within military law specifically addresses the issue of subordinates' accountability to superiors when their behaviour deviates from the prescribed guidelines known as santi aji, which all TNI soldiers are obligated to follow. This regulation is outlined in chapter IV of the second book on crimes, which focusses on service-related offences. This study aims to identify the various types of insubordination crimes committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) and assess the legal responsibility of TNI members who engage in such crimes. The analysis will be based on Articles 97 to 109 of the Indonesian Military Criminal Code (KUHPM). Additionally, the study will examine the measures taken by the Military Police, specifically as military investigators, to mitigate the occurrence of insubordination crimes within the military.

This research examines the attributes of criminal actions of insubordination carried out by military members. The primary objective is to ascertain the variables that impact the incidence of insubordination and the legal responsibility of those responsible. The study used the normative legal technique, using a legislative approach and case studies to elucidate the application of law enforcement in specific instances.

The research findings suggest that insubordination often arises as a consequence of discontentment with commands from superiors, inadequate comprehension of responsibilities, and psychological influences. Legal responsibility encompasses the procedural aspects of the military justice system and the imposition of penalties in line with relevant rules. This research aims to provide insights to relevant stakeholders on enhancing the efficacy of law enforcement in addressing instances of insubordination perpetrated by Military personnel.

Keywords: Indonesian National Army, Military, Insubordination

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan Dewan Pengaji Skripsi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
I. Latar Belakang.....	1
II. Rumusan Masalah.....	7
III. Tujuan Penelitian.....	7
IV. Manfaat Penelitian	8
A. Manfaat Teoritis.....	8
B. Manfaat Praktis.....	8
V. Kerangka Konseptual.....	8
A. Tindak Pidana	8
B. Militer.....	13
C. TNI / Anggota Militer.....	14
D. Insubordinasi.....	24

E. Peradilan Militer.....	26
VI. Metode Penelitian	28
A. Tipologi Penelitian	29
B. Metode Pendekatan	29
C. Bahan Hukum	30
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	31
E. Analisa Badan Hukum	31
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	32

**BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

I. Karakteristik dari Tindak Pidana Insubordinasi	33
II. Bentuk - bentuk Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Anggota Militer	37

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA INSUBORDINASI**

I. Faktor - Faktor Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Insubordinasi.....	45
II. Prosedur Penyelesaian Tindak Insubordinasi yang Dilakukan Anggota Militer	51
A. Proses Penyidikan Perkara Pidana TNI	55
B. Prosedur Beracara di Pengadilan Militer	58

C. Standart Operasional dan Prosedur (SOP) Peradilan Militer.....	67
III. Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi yang Dilakukan Oleh Anggota Militer	77

BAB IV PENUTUP

I. Kesimpulan.....	82
II. Saran.....	83

DAFTAR BACAAN